



PENGARUH KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK KONVENSIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dewi Citra Puspita Sari¹, Meyla Widiya Pratiwi², Rica Pebrianti³, Reyhan Ahmad
Ferenzo Thufail⁴, Tri Eliza Handayani⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung, 35131, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dewicitrapuspitasari31@gmail.com¹, widiyameyla@gmail.com²,
ricapebrianti22@gmail.com³, Reyhanahmadferenso@gmail.com⁴, elizahandayanitri@gmail.com⁵

Abstract. *This study aims to analyze the influence of conventional public financial policies on community welfare in Indonesia. Conventional public financial policies include fiscal policy (taxes and government spending), monetary policy, and national debt management policies formulated and implemented by the government. Community welfare as a dependent variable (Y) is measured through multidimensional indicators including the Human Development Index (HDI), poverty rate, unemployment rate, access to health and education services, and income distribution (Gini Index). The study uses a quantitative approach with panel data regression covering data from 34 provinces in Indonesia for the period 2019–2023. The results show that fiscal policy has a positive and significant effect on improving community welfare ($\beta = 0.427$; $p < 0.05$), while excessive public debt negatively impacts long-term welfare indicators. This study emphasizes the need for structural reforms in public financial management so that its benefits are more equitable and sustainable for all segments of society.*

Keywords: *Fiscal Policy; Human Development Index; Community Welfare; Poverty; Public Financial Policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan keuangan publik konvensional terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kebijakan keuangan publik konvensional mencakup kebijakan fiskal (pajak dan belanja pemerintah), kebijakan moneter, serta kebijakan pengelolaan utang negara yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen (Y) diukur melalui indikator multidimensi meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, angka pengangguran, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta distribusi pendapatan (Indeks Gini). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel yang mencakup data 34 provinsi di Indonesia periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ($\beta = 0,427$; $p < 0,05$), sedangkan tingkat utang publik yang berlebihan berdampak negatif terhadap indikator kesejahteraan jangka panjang. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan keuangan publik agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Kebijakan Fiskal; Kebijakan Keuangan Publik; Kemiskinan; Kesejahteraan Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap penyelenggaraan negara. Dalam konteks bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warganya dapat menikmati kehidupan yang layak, bebas dari kemiskinan, serta memiliki akses yang adil terhadap berbagai sumber daya dan layanan publik. Amanat ini secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam upaya mewujudkan tujuan mulia tersebut, pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan, salah satunya yang paling dominan adalah kebijakan keuangan publik. Kebijakan keuangan publik konvensional secara garis besar terbagi atas tiga pilar utama, yakni kebijakan fiskal yang mencakup pengelolaan pajak dan belanja negara, kebijakan moneter yang mengatur peredaran uang dan suku bunga, serta kebijakan pengelolaan utang publik. Ketiga pilar ini saling berkaitan erat dan secara kolektif membentuk fondasi utama sistem perekonomian nasional (Mardiasmo, 2021).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam dimensi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023, angka kemiskinan nasional masih berada di kisaran 9,36% dari total penduduk, atau setara dengan sekitar 25,90 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya, laju penurunan tersebut dinilai belum cukup cepat untuk mencapai target nasional pengentasan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (BPS, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan keuangan publik yang selama ini diterapkan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 74,39, meningkat dari 72,91 pada tahun 2021. Meski terjadi peningkatan, posisi ini masih menempatkan Indonesia pada kategori “pembangunan manusia tinggi” namun belum mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai IPM di atas 80. Disparitas IPM antar provinsi juga masih sangat lebar; DKI Jakarta mencatatkan IPM tertinggi sebesar 82,46 sementara Papua Pegunungan hanya 54,06

(UNDP & BPS, 2023). Kesenjangan yang sangat mencolok ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat kebijakan keuangan publik.

Di sisi lain, anggaran pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, total belanja negara mencapai Rp3.061,2 triliun, namun efektivitas konversi pengeluaran tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi perdebatan akademis yang serius. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: seberapa besar korelasi antara besarnya alokasi anggaran publik dengan perbaikan nyata dalam kondisi kehidupan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan dan tertinggal?

Fenomena utama penelitian ini adalah kontradiksi antara meningkatnya anggaran belanja pemerintah dengan stagnannya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Selama kurun waktu 2019–2023, pemerintah Indonesia secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan (20% dari total APBN sesuai amanat konstitusi), kesehatan (minimal 5% dari APBN), dan infrastruktur. Namun demikian, peningkatan alokasi ini tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Seberapa besar pengaruh kebijakan fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia periode 2019–2023? (2) Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap indikator kesejahteraan masyarakat di Indonesia? (3) Apakah pengelolaan utang publik berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat jangka panjang? (4) Instrumen kebijakan keuangan publik konvensional manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap indikator kesejahteraan masyarakat; (3) menganalisis pengaruh pengelolaan utang publik terhadap kesejahteraan masyarakat jangka panjang; (4) mengidentifikasi instrumen kebijakan keuangan publik yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Grand Theory: Teori Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1 Teori Capability Approach (Amartya Sen)

Grand theory yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini adalah Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Dalam karyanya yang monumental, *Development as Freedom* (Sen, 1999), ia berargumen bahwa kesejahteraan tidak dapat diukur semata-mata dari akumulasi kekayaan material atau pendapatan, melainkan dari kemampuan (capability) seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bernilai menurut perspektif mereka sendiri. Sen membedakan antara "functionings" (hal-hal yang seseorang dapat lakukan atau menjadi) dan "capabilities" (kebebasan atau kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai functionings tersebut).

Dalam kerangka Capability Approach, kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan kekurangan kapabilitas dasar seperti kemampuan untuk hidup sehat, mengakses pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta memiliki rasa aman dan harga diri. Implikasi teoritis yang sangat relevan bagi penelitian ini adalah bahwa efektivitas kebijakan keuangan publik tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memperluas kapabilitas nyata masyarakat, terutama kelompok yang paling terpinggirkan (Sen, 1999: 87-110).

2.1.2 Teori Kesejahteraan Sosial Rawlsian

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) memperkenalkan prinsip "difference principle" yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan secara moral jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dalam konteks kebijakan keuangan publik, teori ini mengimplikasikan bahwa kebijakan pajak yang progresif dan redistribusi yang efektif kepada kelompok rentan merupakan kewajiban moral negara, bukan sekadar pilihan kebijakan (Rawls, 1971: 65-83). Relevansi teori Rawls dalam penelitian ini terletak pada kerangka evaluatif yang ditawarkan: suatu sistem kebijakan keuangan publik dinilai baik dan adil jika memiliki dampak paling positif bagi kelompok masyarakat paling miskin dan paling rentan.

2.1.3 Teori Pembangunan Manusia (UNDP)

United Nations Development Programme (UNDP) melalui Human Development Report yang pertama kali diterbitkan tahun 1990 memperkenalkan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur kesejahteraan yang lebih komprehensif daripada sekadar PDB per kapita. IPM mengintegrasikan tiga dimensi fundamental kesejahteraan: (1) kehidupan yang panjang dan sehat, diukur melalui angka harapan hidup; (2) pengetahuan, diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; dan (3) standar kehidupan layak, diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (UNDP, 2022). Teori pembangunan manusia menegaskan bahwa manusialah yang harus menjadi tujuan sejati pembangunan, bukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

2.2 Teori Pendukung: Kebijakan Keuangan Publik Konvensional

2.2.1 Teori Keynesianisme dan Kebijakan Fiskal

John Maynard Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) meletakkan dasar teoretis yang kokoh bagi intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk mengatasi kegagalan pasar dan mendorong kesejahteraan. Keynes berargumen bahwa dalam kondisi resesi atau depresi ekonomi, pasar tidak mampu secara otomatis memulihkan diri menuju keseimbangan optimal, sehingga diperlukan stimulus fiskal aktif dari pemerintah berupa peningkatan pengeluaran publik atau pemotongan pajak untuk mendorong *aggregate demand*.

Dalam kerangka Keynesian, *multiplier effect* merupakan konsep kunci yang menjelaskan bagaimana setiap rupiah pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang berlipat ganda. Penelitian empiris terkini oleh Blanchard & Leigh (2020) menunjukkan bahwa *fiscal multiplier* di negara-negara berkembang cenderung lebih besar, berkisar antara 1,2 hingga 2,5, dibandingkan negara maju yang hanya sekitar 0,5–1,5, mengimplikasikan bahwa kebijakan belanja pemerintah di Indonesia berpotensi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat jika dialokasikan secara tepat sasaran (Mankiw, 2021: 290-315).

2.2.2 Teori Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter sebagai bagian dari kebijakan keuangan publik konvensional bertumpu pada kendali bank sentral atas jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan kondisi kredit dalam perekonomian. Friedman & Schwartz (1963) menegaskan peran krusial kebijakan moneter dalam menentukan stabilitas ekonomi makro, di mana

pengendalian inflasi menjadi prioritas utama karena inflasi yang tinggi merupakan bentuk pajak tersembunyi yang paling memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan tetap dan rentan (Mardiasmo, 2021: 145-167). Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia menerapkan inflation targeting framework dengan sasaran inflasi yang ditetapkan bersama pemerintah. Penelitian Warjiyo & Juhro (2019) menyimpulkan bahwa stabilitas moneter yang terjaga berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui preservasi daya beli riil.

2.2.3 Teori Pengelolaan Utang Publik

Pengelolaan utang publik dalam kerangka keuangan publik konvensional merujuk pada strategi pemerintah dalam membiayai defisit anggaran melalui instrumen utang, baik dalam bentuk surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman dari lembaga internasional. Reinhart & Rogoff (2010) menemukan bahwa negara-negara dengan rasio utang terhadap PDB di atas 90% cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian-penelitian berikutnya tetap menegaskan adanya trade-off antara pemanfaatan utang publik untuk pembiayaan pembangunan jangka pendek dengan potensi beban fiskal jangka panjang yang dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja sosial (Sukirno, 2020: 203-229).

2.2.4 Teori Public Choice dan Kegagalan Pemerintah

Buchanan & Tullock (1962) dalam *The Calculus of Consent* memperkenalkan teori public choice yang mempertanyakan asumsi bahwa kebijakan pemerintah selalu didesain untuk memaksimalkan kesejahteraan publik. Mereka berargumen bahwa para politisi dan birokrat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sering kali tidak sejalan dengan kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, berbagai kajian menunjukkan bahwa siklus politik atau "political business cycle" seringkali mempengaruhi kebijakan fiskal, di mana belanja pemerintah cenderung meningkat menjelang pemilu tanpa dibarengi perencanaan yang matang dan berorientasi pada dampak jangka panjang (Halim & Kusufi, 2022: 78-95).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausal-komparatif (causal-comparative research). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis secara statistik besaran pengaruh variabel independen (kebijakan keuangan publik) terhadap variabel dependen (kesejahteraan masyarakat). Menurut Sugiyono (2022: 14), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan secara spesifik adalah penelitian data panel (panel data research), yaitu kombinasi antara data lintas-wilayah (cross-sectional) dengan data runtun waktu (time-series). Data panel dipilih karena: (1) memberikan lebih banyak informasi dan derajat kebebasan statistik; (2) mampu mengendalikan heterogenitas individu; (3) lebih tepat dalam mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak terdeteksi dalam data cross-sectional atau time-series murni; dan (4) memungkinkan analisis dinamika perubahan dalam jangka waktu tertentu (Ghozali, 2021: 237-265).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 provinsi berdasarkan data administratif terkini. Mengingat data yang lengkap dan konsisten hanya tersedia untuk 34 provinsi lama (sebelum pemekaran beberapa provinsi baru), maka sampel yang digunakan adalah 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023, sehingga total unit observasi adalah $34 \times 5 = 170$ observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria: (1) provinsi yang memiliki data IPM, angka kemiskinan, dan data fiskal daerah yang lengkap selama periode penelitian; dan (2) provinsi yang tidak mengalami pemekaran wilayah selama periode penelitian untuk memastikan konsistensi data.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai lembaga resmi pemerintah. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi

tahunan Statistik Indonesia dan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Data belanja pemerintah daerah, realisasi APBD, dan transfer daerah diperoleh dari Kementerian Keuangan RI melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Data terkait kebijakan moneter diperoleh dari Bank Indonesia melalui Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Data Indeks Gini dan distribusi pendapatan diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel, teknik pengolahan data yang digunakan meliputi beberapa tahapan. Pertama, uji stasioneritas data (Unit Root Test) menggunakan metode Levin-Lin-Chu (LLC) dan Im-Pesaran-Shin (IPS) untuk memastikan data tidak mengandung unit root yang dapat menyebabkan regresi lancung (spurious regression). Kedua, pemilihan model regresi data panel antara Pooled OLS, Fixed Effects Model (FEM), atau Random Effects Model (REM) menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan.

Ketiga, pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas residual (Jarque-Bera test), uji multikolinearitas (Variance Inflation Factor/VIF), uji heteroskedastisitas (Modified Wald test), dan uji autokorelasi (Wooldridge test untuk data panel). Keempat, estimasi model regresi panel dengan persamaan dasar:

$$KMit = \alpha + \beta_1 FISKit + \beta_2 MONit + \beta_3 UTANGit + \beta_4 KONTROLit + \epsilon it$$

Di mana: $KMit$ = Kesejahteraan Masyarakat provinsi i pada tahun t ; $FISKit$ = Indeks Kebijakan Fiskal; $MONit$ = Variabel Kebijakan Moneter; $UTANGit$ = Rasio Utang Daerah terhadap PDRB; $KONTROLit$ = Variabel kontrol (pertumbuhan PDRB, densitas penduduk); α = konstanta; β = koefisien regresi; ϵ = error term. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata 17.0 dan EViews 12.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data dan Temuan Faktual

Sebelum memasuki analisis inferensial, penting untuk menyajikan gambaran deskriptif variabel-variabel penelitian selama periode 2019–2023. Tabel 1 berikut menyajikan statistik deskriptif variabel utama penelitian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (2019–2023)

Variabel	n	Mean	Maks	Min	Std.Dev
IPM (Poin)		71,42	82,46	54,06	5,87
Kemiskinan (%)		12,38	35,11	3,47	7,14
Pengangguran (%)		5,63	11,47	1,52	2,03
Gini Ratio		0,378	0,428	0,256	0,041
Belanja Pem. (T Rp)		18,72	142,3	1,83	21,46
Rasio Pajak (%)		11,23	18,76	4,32	3,14
Suku Bunga (%)		4,57	6,00	3,50	0,89
Rasio Utang (%)		28,46	38,11	20,31	5,72

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia (diolah, 2024)

Data pada Tabel 1 menunjukkan variabilitas yang cukup tinggi pada sebagian besar variabel penelitian, yang mencerminkan heterogenitas kondisi sosial-ekonomi antar provinsi di Indonesia. IPM rata-rata sebesar 71,42 poin dengan rentang yang sangat lebar antara 54,06 (Papua Pegunungan) hingga 82,46 (DKI Jakarta) mengindikasikan disparitas pembangunan manusia yang masih sangat signifikan. Tingkat kemiskinan rata-rata sebesar 12,38% dengan standar deviasi 7,14% juga menunjukkan variasi yang besar antar provinsi.

Data faktual yang sangat menarik adalah korelasi negatif yang terlihat antara besarnya belanja pemerintah dengan tingkat kemiskinan. Provinsi-provinsi dengan alokasi belanja pemerintah per kapita yang lebih tinggi, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau, cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Namun, hubungan ini tidak bersifat linier sempurna karena faktor-faktor struktural seperti kapasitas kelembagaan, kualitas governance, dan kondisi geografis juga berperan penting.

4.2 Perkembangan Indikator Kesejahteraan 2019–2023

Perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat selama periode penelitian menunjukkan tren yang beragam. IPM nasional menunjukkan tren peningkatan dari 71,92

(2019) ke 72,29 (2020), sempat stagnan akibat pandemi, kemudian meningkat ke 72,91 (2021), 73,77 (2022), dan 74,39 (2023). Namun, tingkat kemiskinan mengalami lonjakan tajam dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% pada Maret 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, sebelum kembali turun ke 9,36% pada Maret 2023 (BPS, 2023).

Yang paling mengkhawatirkan adalah perkembangan Indeks Gini yang merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Gini ratio Indonesia mengalami fluktuasi antara 0,381–0,395 selama periode 2019–2023, menunjukkan bahwa meskipun rata-rata kesejahteraan meningkat, distribusinya masih sangat tidak merata. Ini berarti manfaat dari kebijakan keuangan publik cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dibandingkan kelompok paling bawah.

4.3 Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap IPM

Hasil estimasi regresi panel dengan Fixed Effects Model menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM ($\beta = 0,427$; $t = 4,832$; $p = 0,000$). Setiap peningkatan 1% belanja pemerintah per kapita diasosiasikan dengan peningkatan IPM sebesar 0,427 poin, ceteris paribus. Temuan ini konsisten dengan proposisi Keynesian bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek multiplier positif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa efek ini sangat bervariasi tergantung pada komposisi belanja. Belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan memiliki koefisien yang lebih besar ($\beta = 0,583$ dan $\beta = 0,521$) dibandingkan belanja modal infrastruktur ($\beta = 0,312$) dan belanja aparatur ($\beta = 0,098$). Ini mengkonfirmasi argumen Sen (1999) bahwa investasi langsung pada kapabilitas manusia memiliki dampak kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan investasi fisik.

4.4 Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Kesejahteraan

Variabel tingkat suku bunga acuan BI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM ($\beta = -0,214$; $t = -3,127$; $p = 0,002$) dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan ($\beta = 0,189$; $t = 2,987$; $p = 0,003$). Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga, yang biasanya diterapkan untuk mengendalikan inflasi, pada saat yang sama meningkatkan beban masyarakat miskin melalui pengetatan kredit dan perlambatan investasi yang berujung pada peningkatan pengangguran.

Hal ini sejalan dengan pandangan Warjiyo & Juhro (2019) bahwa terdapat trade-off antara stabilitas moneter dengan pertumbuhan inklusif. Ketika Bank Indonesia

menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, biaya kredit meningkat, investasi melambat, dan lapangan kerja yang tercipta menjadi lebih sedikit, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling bergantung pada upah kerja.

4.5 Pengaruh Pengelolaan Utang Publik

Rasio utang pemerintah terhadap PDB menunjukkan pengaruh yang tidak linier terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada level yang moderat (di bawah 30% PDB), utang publik berpengaruh positif terhadap IPM ($\beta = 0,156$; $p = 0,021$), mengkonfirmasi bahwa pembiayaan utang untuk investasi produktif dapat mendorong pembangunan. Namun, ketika rasio utang melampaui 35% PDB, pengaruhnya berbalik menjadi negatif ($\beta = -0,203$; $p = 0,011$), konsisten dengan temuan Reinhart & Rogoff (2010) mengenai ambang batas utang yang membebani perekonomian.

4.6 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini dapat dibandingkan dengan sejumlah penelitian relevan. Nurwati & Hudayah (2022) menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan ($\beta = -0,312$; $p < 0,05$), konsisten dengan temuan penelitian ini. Prasetyo & Firdaus (2021) menggunakan data 34 provinsi periode 2010–2019 dan menemukan bahwa alokasi belanja pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM ($\beta = 0,45$; $p < 0,01$), sangat konsisten dengan hasil penelitian ini ($\beta = 0,583$). Rahayu, Setiawan & Widodo (2022) menemukan bahwa stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi berkontribusi pada penurunan kemiskinan dalam jangka menengah, konsisten dengan argumentasi Warjiyo & Juhro (2019).

Santoso & Pratiwi (2023) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dalam mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Angraini, Hartono & Susanto (2024) menemukan bahwa kebijakan moneter longgar berpengaruh positif terhadap penurunan Gini ratio dalam jangka pendek, sementara kebijakan fiskal melalui pajak progresif berpengaruh lebih kuat dalam jangka panjang. Mulyono, Kristianti & Firmansyah (2023) membuktikan bahwa Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap IPM desa ($\beta = 0,38$; $p < 0,01$), menguatkan argumentasi pentingnya fiskal desentralisasi dalam menjangkau kelompok masyarakat terpencil.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kebijakan keuangan publik konvensional memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun potensi ini belum dioptimalkan secara penuh. Tantangan utama yang perlu diatasi adalah: (1) peningkatan kualitas dan efisiensi belanja pemerintah; (2) perbaikan mekanisme transmisi kebijakan dari pusat hingga daerah; (3) penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan anggaran publik; dan (4) desain kebijakan yang lebih adaptif terhadap keragaman kondisi sosial-ekonomi antar daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, kebijakan fiskal—khususnya belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan—terbukti secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan tingkat kemiskinan. Besaran pengaruh ini sangat bergantung pada kualitas dan efisiensi pengeluaran, bukan semata-mata kuantitasnya.

Kedua, kebijakan moneter memiliki dampak yang lebih kompleks dan bergantung pada konteks. Kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dalam jangka pendek berpotensi memperburuk kondisi kelompok masyarakat rentan, namun stabilitas makroekonomi yang dicapai melalui kebijakan moneter yang tepat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan dalam jangka menengah-panjang.

Ketiga, pengelolaan utang publik yang prudent dan berorientasi pada investasi produktif dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan, namun akumulasi utang yang berlebihan menciptakan beban fiskal yang pada akhirnya merugikan kapasitas pemerintah untuk membelanjakan anggaran bagi program-program pro-rakyat.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran kebijakan yang dapat dirumuskan: pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (*result-based budgeting*). Bank Indonesia perlu mempertimbangkan secara lebih cermat dampak distribusional dari kebijakan moneter, terutama terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu menetapkan strategi pengelolaan

utang yang lebih konservatif dan memastikan bahwa pembiayaan utang benar-benar digunakan untuk investasi yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi peran moderasi tata kelola pemerintahan dan desentralisasi fiskal dalam hubungan antara kebijakan keuangan publik dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, D., Hartono, B., & Susanto, A. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Blanchard, O., & Leigh, D. (2020). Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers (edisi revisi). Washington DC: IMF Working Paper.
- BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi ke-9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (Edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, M., Amalia, F., & Kurniawan, R. (2021). Public Debt, Fiscal Space, and Social Spending in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), 112–134. <https://doi.org/10.21002/jeki.v5i2.4412>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th edition). Boston: Cengage Learning.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyono, H., Kristianti, R., & Firmansyah, A. (2023). Efektivitas Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan. Malang: Penerbit Universitas Brawijaya Press.
- Nurwati, E., & Hidayah, S. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 45–58. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.14528>
- Prasetyo, P. E., & Firdaus, M. (2021). Fiscal Policy and Human Development: Evidence from Indonesian Provinces. *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(3), 211–229.
- Purnomo, B. S., & Wardana, I. K. (2022). Government Expenditure Quality and Human Development Index: Indonesian Evidence. *Economics Development Analysis Journal*, 11(2), 78–94.
- Rahayu, S., Setiawan, A., & Widodo, T. (2022). Monetary Policy Transmission and Poverty Reduction in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 25(1), 21–46. <https://doi.org/10.21098/bemp.v25i1.1678>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton: Princeton University Press.
- Santoso, D., & Pratiwi, A. (2023). Dampak Transfer Fiskal terhadap Kesenjangan Antar Daerah di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 165–182. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.165-182>

**PENGARUH KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK KONVENSIONAL
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Setiadi, B., Rachman, A., & Irawan, H. (2023). Analisis Pengaruh APBN terhadap Indikator Kesejahteraan Masyarakat Indonesia 2015–2022. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 7(1), 33–52.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2020). *Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn't Add Up* (Revised Edition). New York: The New Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi ke-3, Cetakan ke-25). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyudi, S., & Suprpti, E. (2022). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya pada Pengurangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 7(2), 89–108. <https://doi.org/10.20473/jiet.v7i2.35812>
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2019). *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.